



Pengelolaan Wisata Kampung Berbasis Masyarakat Di Kampung Buti Distrik Merauke

Oleh:

¹ Paul Adryani Moento; ² Hubertus Oja; ³ Vincenzo Serano; ⁴ Muhammad Hasan Lefuy

¹. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

Co-Author Email: paulmoento@unmus.ac.id

Received: 01-11-2024

Accepted: 25-11-2024

Published: 03-12-2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengelolaan Potensi Wisata Kampung Buti Berbasis Masyarakat Di Kampung Buti Distrik Merauke. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 8 orang sebagai informan. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah perencanaan dalam melakukan pengelolaan wisata kampung buti, perencanaan yang di lakukan dengan melihat potensi yang ada di pantai buti, kemudian pemerintah kampung buti melakukan rapat bersama dengan masyarakat dengan menampung seluruh masukan masukan dari masyarakat, kemudian pelaksanaan, Pemerintah Kampung Buti secara aktif melakukan pembersihan di area sekitar pantai yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata, selanjutnya, pengorganisasian, Komitmen dan strategi pemerintah Kampung Buti dalam mengelola wisata Pantai Buti sangat jelas. Terdapat penekanan pada pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif, menunjukkan bahwa pengelolaan ini bukan sekedar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis untuk mencapai visi yang lebih luas. Serta pengawasan, Hasil positif dari pengelolaan wisata pantai menunjukkan efektivitas sistem pengawasan yang dipimpin Kepala kampung dengan fleksibilitas dalam berkoordinasi.

Kata kunci : Pengelolaan, wisata, kampung

Abstract

The purpose of the study is to find out the Management of Community-Based Tourism Potential of Kampung Buti in Kampung Buti, Merauke District. To obtain research data, the researcher interviewed 8 people as informants. The data was analyzed using a descriptive method. This study uses a qualitative approach, while the data analysis technique, the author uses three stages: Data reduction, Data presentation, and Conclusion. The results of this research are planning in managing tourism in Kampung Buti, planning is carried out by looking at the potential that exists on Buti Beach, then the Government of Kampung Buti holds a joint meeting with the community by accommodating all inputs from the community, then the implementation, the Government of Kampung Buti actively cleans up the area around the beach The organization, commitment and strategy of the Kampung Buti government in managing Buti Beach tourism is very clear. There is an emphasis on achieving effective government goals, showing that this management is not just a routine activity, but a strategic step to achieve a broader vision. As well as supervision, the positive results of beach tourism management show the effectiveness of the supervision system led by the village head with flexibility in coordinating.

Keywords : Management, tourism, village.

Suatu Pengelolaan pariwisata tidak hanya tentang kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, daya tarik dan ciri khas tersendiri suatu objek wisata, serta kelompok sosial maupun komunitas yang bersangkutan dengan objek wisata namun bisa saja pengelolaan suatu objek wisata juga terdapat aktifitas lain yang dapat mendukung dalam sektor ekonomi suatu daerah. Pengelolaan suatu objek wisata bukan hanya seputar pengembangan serta pemanfaatan daya Tarik wisata itu sendiri melainkan bagaimana dalam pengelolaannya pemerintah maupun masyarakat selaku pelaksana mampu menjaga kelestarian alam, kemajemukan budaya, adat istiadat serta agama (Suryani et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya dengan berlandaskan pada prinsip- prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Salah satu prinsip Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 ini juga adalah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsionalitas dengan tujuan meningkatkan kebutuhan ekonomi, menentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran serta meningkatkan kebudayaan dan kelestarian lingkungan (Suryanti & Indrayasa, 2021).

Kementerian kebudayaan dan Pariwisata melakukan inovasi terbaru dengan mengggagas tata kelola daerah tujuan wisata berlabel DMO (Destination Management Organization) yang mana dikenal sebagai pengelolaan destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis dengan memanfaatkan jejaring informasi dan teknologi yang tersistem secara terpadu dengan peran serta masyarakat, palaku/kelompok, industri, akademisi serta pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melihat kualitas pengelolaan pariwisata, volume pengunjung, lama tinggal serta besaran pengeluaran wisatawan tidak lupa bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat lokal (Hakiki, 2022).

Belakangan ini telah muncul model pembangunan yang sesuai dengan pengembangan pariwisata yang berbasis kepada masyarakat, model pembangunan ini tidak lain dapat berfungsi sebagai suatu usaha pemerintah dalam pendayagunaan masyarakat dimana masyarakat diikutsertakan dalam pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat.

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga pemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan untuk masyarakat (Yanis Putri Mahanani, 2021).

Merauke merupakan ibu kota Provinsi Papua Selatan yang memiliki banyak potensi alam dan budaya. Salah satunya di Kampung Buti sendiri terdapat beberapa objek wisata yang menarik diantaranya Rumah honai, wisata Kampung Mbuti dan banyak lainnya. Objek-objek wisata yang berada di Kampung Buti ini sendiri merupakan objek wisata yang dikelola sendiri oleh masyarakat setempat.

Namun Baru-baru ini kami sudah menanam enam ribu biji akan tetapi mangrove ini tidak bias hidup di pasir melaingkan di lumpur bagaimana mangrove ini bias hidup sedangkan kami menanam di atas pasir sehingga tidak bias hidup. Dan sampai saat ini kami terus berusaha untuk menanam' tetapi hanya beberapa saja yang kami bias merawat sampai saat ini masih hidup di wisata Kampung mbuti. Sampai saat ini belum ada caprur tangan dari pihak pemerinath daerah sehingga kami masih menggunakan dana kampung sehingga dari masyarakat kampung mbuti yang kelolah sendiri hinga saat ini. Salah satu potensi yang ada di kampung mbuti spot-spot foto untuk menarik wisatawan khususnya anak muda mudi dan para wisatawan.

Dari segi kemanaan juga di jamin karena saat ini masyarakat sudah mulai ikut partisipasi dalam mengembangkan wisata sehingga kedepan dari mama mama papua yang mau jualan di wisata kampung mbuti dari pihak pengeloleh wisata akan menyediakan tempat untuk mama-mama papua yang mau jualan, Sehingga dari pihak pengelolah wisata menarik retribusi. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bagaimana potensi objek wisata tersebut merupakan objek wisata berbasis masyarakat salah satunya rumah honai meskipun pada awalnya dibentuk hanya sebagai rumah edukasi namun ketertarikan masyarakat atas keunikan rumah honai ini mulai diminati banyak pengunjung baik itu wisatawan local maupun mancanegara, Sumber dana awal pembentukan rumah honai ini dengan memanfaatkan swadaya masyarakat setempat serta dengan memanfaatkan limbah sampa daur ulang.

Keuntungan dari hasil yang diperoleh dari Rumah honai ini sendiri digunakan pengelola untuk membenahi serta membangun bangunan Rumah honai sendiri dengan membeli sampah daur ulang pada masyarakat sehingga masyarakat setempat dapat terberdayakan dengan adanya objek wisata Rumah honai ini, dalam hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam mencanangka program peduli lingkungan.

Tidak hanya itu, dengan adanya objek wisata Rumah honai atau di kenal dengan honai ini dapat membantu perekonomian dengan adanya usaha-usaha seperti kuliner, akomodasi dan transportasi. Namun, dalam pengelolaan objek wisata yang ada di Kampung Mbuti ini masih menemui beberapa kendala yang menghambat dalam proses pengelolaannya. Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam proses pengelolaan objek wisata yang ada di Kampung Mbuti.

Pertama, permasalahan anggaran pengembangan, adanya keterbatasan anggaran menyebabkan pihak pengelola dalam mengembangkan program kesulitan. Dengan terbatasnya anggaran yang pengelola pariwisata untuk porsi bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata menyebabkan program-program yang dilakukan hanya bersifat insidental dan tidak dilakukan secara rutin.

Kedua, permasalahan lahan dimana lahan yang digunakan sebagai objek wisata merupakan lahan milik warga sehingga dibutuhkan negosiasi antara kepala kampung dan pihak pengelola dengan masyarakat bersangkutan untuk menghindari kesalahpahaman.

Ketiga, permasalahan aksesibilitas dimana dalam suatu kegiatan pengelolaan pariwisata sangat penting peran transportasi, restorasi dan akomodasi. Karena dalam kegiatan wisata cepat atau lambat sangat memengaruhi dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dibutuhkan pembangunan secara berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sebab besar harapan peningkatan perekonomian masyarakat dari pengelolaan pariwisata serta mampu menjadikan masyarakat mandiri terberdayakan.

Serta dalam pengelolaannya diharapkan kerjasama antar pihak pengelola dan masyarakat sebagaimana pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan kepuasan terhadap pengunjung sehingga penting bagi pengelola untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kearifan budaya lokal. Pengelolaan berbasis kearifan lokal dalam pengembangan objek wisata di Kampung Buti ini, tak akan berhasil tanpa adanya perhatian dari multipihak untuk membantu keberhasilan pengelolaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya objek wisata ini diharapkan dapat membantu pemerintah setempat dalam memberdayakan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang mandiri. Berdasarkan uraian di atas, maka yang ingin saya kaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana tata kelola dari kepariwisataan yang berbasis masyarakat di Distrik Merauke Kabupaten Merauke, ini menjadi menarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Potensi Wisata Kampung Berbasis Masyarakat Di Kampung

Buti Kecamatan Merauke.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian deskriptif, yang fokusnya adalah pada masalah atau fenomena yang hadir saat penelitian dilaksanakan, sesuai dengan pendapat Nawawi mengenai jenis deskriptif sebagai tipe penelitian yang menitikberatkan pada masalah atau fenomena yang hadir pada saat penelitian dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pengelolaan Potensi Wisata Kampung Berbasis Masyarakat Di Kampung Buti Kecamatan Merauke. kemudian Penelitian ini dilakukan kampung buti distrik merauke. Sumber data yang di dapat dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan selanjutnya, teknis analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang melibatkan serangkaian kebijakan dan cara pelaksanaannya. Claire A. Gunn (1993: 141) juga menyatakan hal serupa, menekankan beberapa poin penting dalam fungsi kebijakan regional dan lokal yang berperan krusial dalam sektor kepariwisataan. Pertama, perencanaan perlu meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas dan mendorong perubahan yang konstruktif, serta mengembangkan lokasi potensial untuk meningkatkan daya tarik yang dapat dipasarkan. Kedua, kebijakan kepariwisataan harus lebih fokus daripada sekadar kegiatan promosi dan harus didukung oleh penelitian. Ketiga, perencanaan pariwisata membutuhkan kolaborasi antara sektor publik dan privat agar aspirasi semua pemangku kepentingan dapat terpenuhi. Keempat, kebijakan regional dan lokal harus memperkuat seluruh proses perencanaan dan mendukung pembangunan pariwisata yang baik di tingkat destinasi. Kelima, kebijakan tersebut harus mendorong sektor usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Keenam, kebijakan harus mampu menjembatani hubungan antara bisnis, pemerintah, dan atraksi non-profit, sehingga perencanaan usaha untuk atraksi alam dan budaya didukung oleh industri perjalanan dan akomodasi lainnya. Pendapat para ahli di atas di kombinasikan dalam pembahasan yaitu penulis memberikan pendapat bahwa Pemerintah kampung buti melakukan perencanaan dalam melakukan pengelolaan wisata kampung buti, perencanaan yang di lakukan dengan melihat potensi yang ada di pantai buti, kemudian pemerintah kampung buti melakukan rapat bersama dengan masyarakat dengan menampung seluruh masukan masukan dari masyarakat, selanjutnya pemerintah kampung buti juga melakukan pencarian informasi langsung ke rumah masyarakat terkait rencana

pengelolaan wisata kampung buti. Segala masukan tersebut di rangkum dan di masukan kedalam rencana program kerja pemerintah kampung buti. Namun kendala yang di alami yaitu, anggaran yang belum turun dari pemerintah daerah dikarenakan kepala kampung terpilih belum di lantik secara defenitif.

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah serangkaian aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses ini mencakup penyediaan segala kebutuhan, alat yang diperlukan, penunjukan pelaksana, serta penentuan lokasi dan metode yang harus diterapkan. Pelaksanaan merupakan langkah tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan, yang melibatkan pengambilan keputusan serta langkah strategis dan operasional, sehingga kebijakan dapat terwujud dan sasaran program yang ditetapkan dapat tercapai.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan penulis yaitu, Pemerintah Kampung Buti secara aktif melakukan pembersihan di area sekitar pantai yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung program pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan. Pembersihan dilakukan setiap hari Jumat dan melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan. Dalam pengelolaan wisata pantai ini, semua pihak, baik pemerintah kampung maupun masyarakat setempat, berperan aktif. Kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan pantai, serta menarik lebih banyak pengunjung untuk menikmati pesona alam Kampung Buti. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pengelolaan wisata dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan budaya lokal.

Pengorganisasian

Pengorganisasian memiliki peran yang sangat penting dan krusial untuk langkah-langkah selanjutnya dalam manajemen. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kontribusi anggotanya. Keberhasilan dapat tercapai jika terdapat kerjasama yang baik di antara anggota, sementara kegagalan seringkali disebabkan oleh faktor internal yang negatif dalam pengorganisasian. Proses pengorganisasian adalah mekanisme utama yang digunakan oleh manajer untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Pengorganisasian yang efektif akan menciptakan dan menjaga hubungan antara semua sumber daya organisasi, serta menentukan sumber daya mana yang harus digunakan untuk aktivitas tertentu, kapan, di mana, dan bagaimana cara menggunakannya. Upaya pengorganisasian yang terencana dengan baik akan mencegah manajer dari duplikasi kegiatan dan meminimalisir sumber daya yang tidak terpakai.

Komitmen dan strategi pemerintah Kampung Buti dalam mengelola wisata Pantai Buti sangat jelas. Pertama, terdapat penekanan pada pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif, menunjukkan bahwa pengelolaan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis untuk mencapai visi yang lebih luas. Ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kedua, pengelolaan dilakukan secara mandiri, mencerminkan kemandirian pemerintah kampung dalam mengelola sumber daya dan aktivitas tanpa bergantung pada pihak luar. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Selanjutnya, penugasan kepala kampung kepada aparat untuk mengkoordinasikan kegiatan adalah aspek penting untuk memastikan kelancaran proses pengelolaan. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap anggota aparat memiliki peran spesifik yang mendukung efektivitas operasional. Informasi yang disampaikan oleh aparat mengenai kegiatan pembersihan menunjukkan adanya transparansi dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan serta kelestarian Pantai Buti.

Koordinasi yang baik antara aparat kampung tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kerja sama di antara anggota masyarakat. Secara keseluruhan, analisis ini menekankan pentingnya komitmen, kemandirian, dan koordinasi dalam pengelolaan wisata Pantai Buti, yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dan efektivitas dalam pemerintahan lokal.

Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif harus mematuhi beberapa prinsip, yaitu adanya rencana yang jelas serta pemberian instruksi dan wewenang kepada bawahan. Rencana berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk menilai pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan dan menjadi acuan untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Pemberian instruksi dan wewenang bertujuan agar sistem pengawasan dapat dijalankan dengan efektif. Selain itu, sistem pengawasan dianggap efektif jika memenuhi prinsip fleksibilitas, yang berarti pengawasan tetap dapat diterapkan meskipun terjadi perubahan tak terduga pada rencana.

Koordinasi ini sangat penting untuk membangun sinergi antara pemerintah dan warga. Pernyataan bahwa pengelolaan wisata pantai berjalan dengan baik menunjukkan adanya hasil positif dari pengawasan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan kepala kampung melakukan pengawasan dengan fleksibel melalui koordinasi dengan koordinator yang ditugaskan. Pendekatan ini sangat penting untuk menyesuaikan strategi pengawasan dengan kondisi yang ada, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik meskipun menghadapi perubahan situasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah kampung buti

melakukan perencanaan dalam melakukan pengelolaan wisata kampung buti, perencanaan yang di lakukan dengan melihat potensi yang ada di pantai buti, kemudian pemerintah kampung buti melakukan rapat bersama dengan masyarakat dengan menampung seluruh masukan masukan dari masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan, Pemerintah Kampung Buti secara aktif melakukan pembersihan di area sekitar pantai yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung program pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan. Pembersihan dilakukan setiap hari Jumat dan melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Kemudian pengorganisasian, Komitmen dan strategi pemerintah Kampung Buti dalam mengelola wisata Pantai Buti sangat jelas. Terdapat penekanan pada pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif, menunjukkan bahwa pengelolaan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis untuk mencapai visi yang lebih luas. Ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Pengelolaan dilakukan secara mandiri, mencerminkan kemandirian pemerintah kampung dalam mengelola sumber daya dan aktivitas tanpa bergantung pada pihak luar. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Serta pengawasan, Hasil positif dari pengelolaan wisata pantai menunjukkan efektivitas sistem pengawasan yang dipimpin Kepala kampung dengan fleksibilitas dalam berkoordinasi, penting untuk menyesuaikan strategi pengawasan dengan kondisi yang berubah.

DAFTAR PUSTAKA:

- Gunn, C. A. (1993). *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*. Taylor & Francis.
- Hakiki, R. (2022). "Inovasi DMO dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata". *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 15(2), 87-102.
- Nawawi, H. (2003). *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Suryani, R., & Indrayasa, I. G. (2021). "Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Bali: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi dan Sosial". *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*, 19(1), 33-45.
- Suryani, R., & Indrayasa, I. G. (2021). *Dasar-Dasar Kepariwisata*. Udayana University Press.
- Yanis Putri Mahanani. (2021). "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Indonesia". *Jurnal Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 22(3), 120-134.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). *Principles of Marketing* (16th ed.).

- Pearson Education.
- Suprayitno, S. (2015). *Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Indonesia*. Andi Offset.
- Bieger, T., & Laesser, C. (2019). *Tourism Management: An Introduction*. Springer.
- Rukmana, D. (2020). "Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia: Studi Kasus di Bali". *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 10(1), 45-59.
- Rahman, A. (2020). "Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat". *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(4), 67-78.
- Hasim, S. (2017). *Manajemen Destinasi Pariwisata*. Ghalia Indonesia.
- Fandeli, C., & Ginting, G. (2014). "Konsep dan Aplikasi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan". *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 5(2), 55-69.
- Garrod, B., & Fyall, A. (2013). *Contemporary Issues in Tourism Development*. Channel View Publications.
- Puspasari, A. (2020). "Strategi Pengelolaan Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata". *Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan*, 17(3), 99-112.